

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori.....	27
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan.....	41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

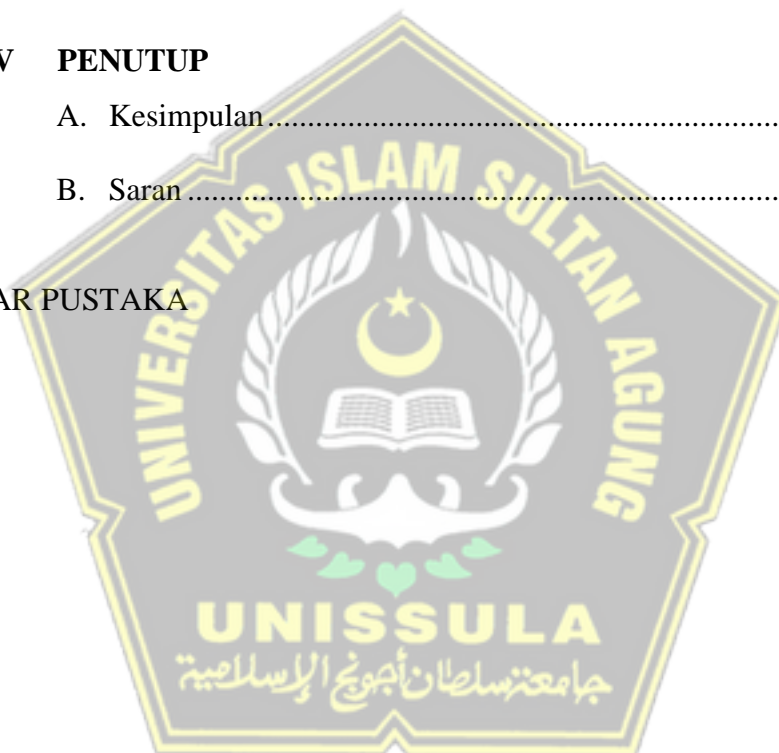
A. Tinjauan Umum tentang Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	43
1. Pemulihan Aset Korupsi Dalam UNCAC dan StAR Initiative	43
2. Pemulihan Aset Di Indonesia.....	47
B. Tinjauan Umum tentang Pidana/Pemidanaan.....	51
1. Pidana.....	51
2. Pemidanaan	57
C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti	63
1. Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.	63
2. Tujuan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti	67
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	69
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	69
2. Pertanggungjawaban Pidana	74
E. Tinjauan Umum tentang Korupsi	82
1. Sebab Akibat Korupsi.	82
2. Tipologi Korupsi	86
F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	91

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	97
B. Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.....	171
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	206
B. Saran.....	209

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Korupsi Berkaitan dengan Uang Pengganti	134
Tabel 2	Disparitas Uang Pengganti Antara Rp100 Juta-Rp1 Miliar	151
Tabel 3	Disparitas Uang Pengganti di Atas Rp1 Miliar	153
Tabel 4	Kelemahan-kelemahan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	169
Tabel 5	Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan	203

DAFTAR SKEMA

SKEMA	KETERANGAN	HALAMAN
Skema 1	Implementasi Pembayaran Pidana Uang Pengganti	162